



## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Alamat : Jalan Basuki Rahmat Nomor 02, Samarinda

Telp: (0541) 743995

Email: prov\_kaltim@kpu.go.id

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurdianawan

Jabatan : Plt. Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Fahmi Idris

Jabatan : Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Samarinda, 4 Februari 2025

Pihak Kedua,

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Kalimantan Timur,



Pihak Pertama,

Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Kalimantan Timur,

Nurdianawan



## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Alamat : Jalan Basuki Rahmat Nomor 02, Samarinda

Telp: (0541) 743995

Email: prov\_kaltim@kpu.go.id

### PERJANJIAN KINERJA

Nama/Unit Organisasi : Sekretariat KPU Provinsi insi Kalimantan Timur

Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
2	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
3	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu	Jumlah fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi	5 keg
4	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali
5	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan Reformasi Birokrasi	100%
7	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat dan akurat	97,5%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase penegakan disiplin pegawai	90%
8	Terlaksananya layanan pengadaan pegawai secara transparan dan akuntabel	Persentase pegawai yang terseleksi	100%
		Persentase pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	100%
9	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam <i>Database</i> kepegawaian berbasis teknologi informasi	90%
10	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%
11	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%
12	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap
13	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%
14	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang	95%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	penggunaan anggaran	Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	
15	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data Sistem Akuntansi Keuangan	1 Lap
16	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif sesuai kearsipan	87.5%
17	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berfungsi dengan baik	100%
18	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
19	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase penurunan nilai temuan hasil Pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30%
20	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	75%
21	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	75%
22	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%
23	Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Persentase terlaksananya pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui e-SPIP	100%
24	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
25	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	3 perkara
		Penurunan jumlah sengketa hukum yan diajukan ke Mahkamah Konstitusi	2 perkara
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%
26	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
27	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	11 satker
		Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	36,36% (4 satker)
28	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU	100%
29	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
30	Terlaksananya Bakohumas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur	Persentase pelaksanaan Bakohumas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur	100%
31	Daftar permohonan informasi publik melalui PPID dan e-PPID	Persentase daftar permohonan informasi publik melalui PPID dan e-PPID	100%
32	Pemutakhiran Data Partai Politik	Data Partai Politik yang mutakhir dan berkualitas	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 142.700.744.000,-
2. Program Dukungan Manajemen	Rp 11.934.245.000,-

Samarinda, 4 Februari 2025

Pihak Kedua,  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Kalimantan Timur,



Rahmi Idris

Pihak Pertama,  
Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Kalimantan Timur,

Nurdyanawan